



BAB III CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputy Bidang Polhukam) Tahun 2019 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Polhukam yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis Deputy Bidang Polhukam.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Deputy Bidang Polhukam dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen kinerja maupun peningkatan kinerja Deputy Bidang Polhukam secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder* Deputy Bidang Polhukam.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas perbandingan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi.

Pengukuran kinerja di Deputy Bidang Polhukam telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Deputy Bidang Polhukam. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan, digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih diantara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.

Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Deputy Bidang Polhukam terbatas pada pencapaian sasaran-sasaran strategis Deputy Bidang Polhukam. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini hanya melaporkan hal-hal yang strategis saja,



sehingga hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporkan oleh unit kerja eselon II dibawahnya.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2019 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	≥ 100	Memuaskan
2	85 % - 100 %	Sangat Baik
3	70 % - <85 %	Baik
4	55 % - < 70 %	Cukup
5	< 55%	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2019 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2019. Secara umum Deputi Bidang Polhukam tidak mengalami perubahan nomenklatur, sesuai dengan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam struktur tersebut, nomenklatur unit eselon II menggambarkan tugas dan fungsi yang secara garis besarnya menyiapkan rekomendasi yang berkualitas di bidang Polhukam dalam bentuk rekomendasi kebijakan, rekomendasi izin prakarsa, dan rekomendasi materi sidang Kabinet yang telah ditetapkan menjadi Sasaran Strategis Deputi Polhukam, yakni sebagai berikut:





- A. PERSENTASE REKOMENDASI ATAS RENCANA DAN PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS KABINET
- B. PERSENTASE REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN IZIN PRAKARSA DAN SUBSTANSI RANCANGAN PUU DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS KABINET
- C. PERSENTASE REKOMENDASI TERKAIT MATERI SIDANG KABINET, RAPAT ATAU PERTEMUAN YANG DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS KABINET

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, Deputi Bidang Polhukam telah melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut.

Capaian Kinerja Deputi Bidang Polhukam

Secara garis besar Deputi Polhukam telah menyelesaikan penugasan yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet terkait dengan penyampaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Polhukam berupa rekomendasi kebijakan yang berkualitas dibidang Polhukam.

Secara garis besar **capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam** dalam mencapai Sasaran Strategis di tahun 2019 ini adalah sebesar **97,40%** atau tergolong dalam kategori **sangat baik** (karena capaian sasaran sebesar 97,40% berada pada rentang 85% - 100%).

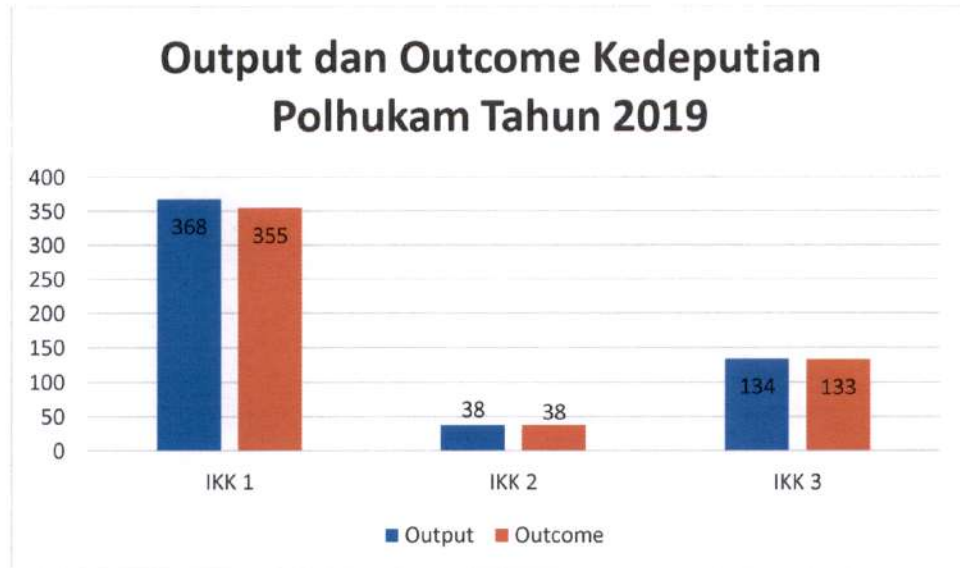
Tabel 3.2
Capaian Rekomendasi
(Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018)

Rekomendasi	Output	Outcome	% CAPAIAN
1. Rekomendasi Kebijakan (memorandum dan surat Sekretaris Kabinet)	368	355	96,46%
2. Rekomendasi Izin Prakarsa dan Substansi RPUU serta Rancangan yang ditetapkan Presiden	38	38	100%
3. Rekomendasi Materi Sidang, Butir Wicara, dan Arahan Presiden	134	133	99,25%
Total	540	524	97,40%



Gambar 3.1

Capaian Output dan Outcome Kedeputian Polhukam Tahun 2019



Uraian mengenai capaian indikator sasaran, yaitu capaian kinerja Deputy Bidang Polhukam dari mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Sasaran
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019

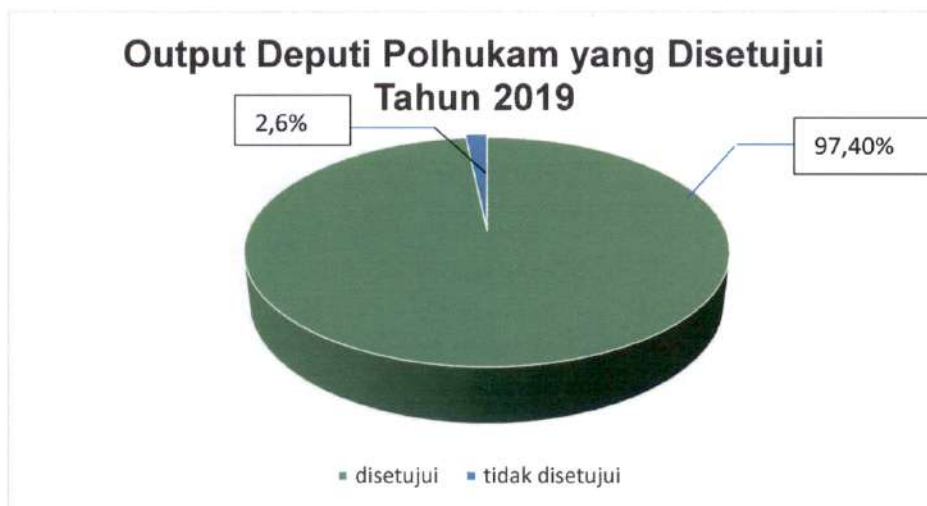
NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	96,46%	96,46%
2.	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%
3.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	99,25%	99,25%



Dari ketiga indikator sasaran di atas, persentase realisasi output yang dicapai Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan didapat total realisasi capaian sebesar 97,40% telah disetujui Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan diteruskan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga untuk ditindaklanjuti, serta diberikan catatan/arahan/disposisi kepada Deputi untuk ditindaklanjuti) dan 2,60% tidak disetujui oleh Sekretaris yakni atas rekomendasi tersebut Sekretaris Kabinet tidak memberikan catatan/arahan/disposisi (berkas turun tanpa ada tulisan Sekretaris Kabinet). Dengan rincian, Indikator sasaran 1 telah memenuhi target yakni 97%, indikator 2 telah memenuhi target sebesar 100%, dan indikator 3 telah memenuhi target sebesar 99%.

Gambar 3.2

Output Kedeputan Polhukam yang Disetujui Tahun 2019



Pada tahun 2019 Kedeputan Politik, Hukum dan Keamanan mengalami **penurunan** total output sebanyak 167 output dibandingkan tahun sebelumnya. Total output yang dicapai pada tahun 2019 sebesar 540 sedangkan total output pada tahun 2018 sebesar 707 output. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, persentase output disetujui mengalami penurunan menjadi 97,40% pada tahun 2019 dari yang sebelumnya 98,30% pada tahun 2018 dan 99,30% pada tahun 2016, namun pada tahun ini mengalami peningkatan persentase output yang disetujui pada tahun 2017 sebesar 96,75% dan pada tahun 2015 sebesar 95,16%, sebagaimana terlihat pada table dan gambar di bawah ini.



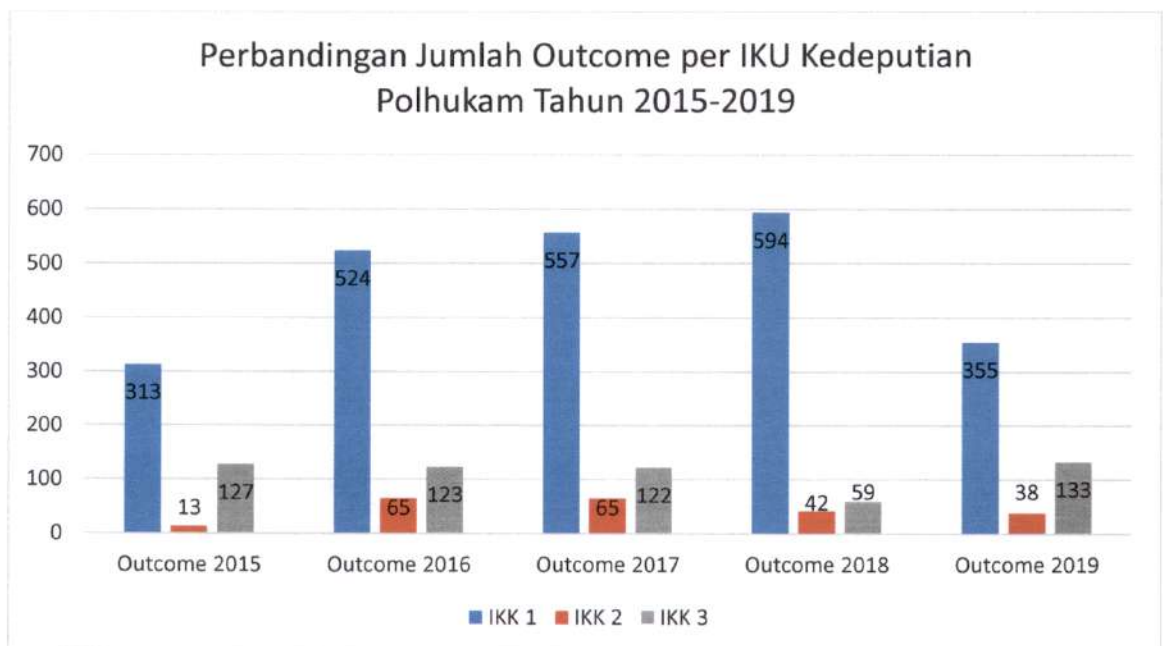
Tabel 3.4

Perbandingan Output dan Outcome Kedepuitan Polhukam
Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Indikator	Output 2015	Out-come 2015	Output 2016	Out-come 2016	Output 2017	Out-come 2017	Output 2018	Out-come 2018	Output 2019	Out-come 2019
IKK 1	327	313	529	524	573	557	600	594	368	355
IKK 2	13	13	65	65	67	65	42	42	38	38
IKK 3	136	127	123	123	129	122	65	59	134	133
Total	476	453	717	712	769	744	707	695	540	526
Disetujui		95,16%		99,30%		96,75%		98,30%		97,40%
Tidak Disetujui		4,84%		0,70%		3,25%		1,70%		2,60%

Gambar 3.3

Perbandingan Jumlah Outcome Per IKU Kedepuitan Polhukam Tahun 2015-2019



Penjelasan terhadap Tabel 3.4 dan Gambar 3.3 di atas adalah secara umum turun naiknya jumlah total output (**kuantitas**) setiap tahunnya maupun total outcome (**kuantitas**) tidak memperlihatkan capaian kinerja dari Deputi Bidang Polhukam mengingat kalimat Indikator Kinerja Utama adalah "**persentase rekomendasi yang disetujui**" dengan target yang

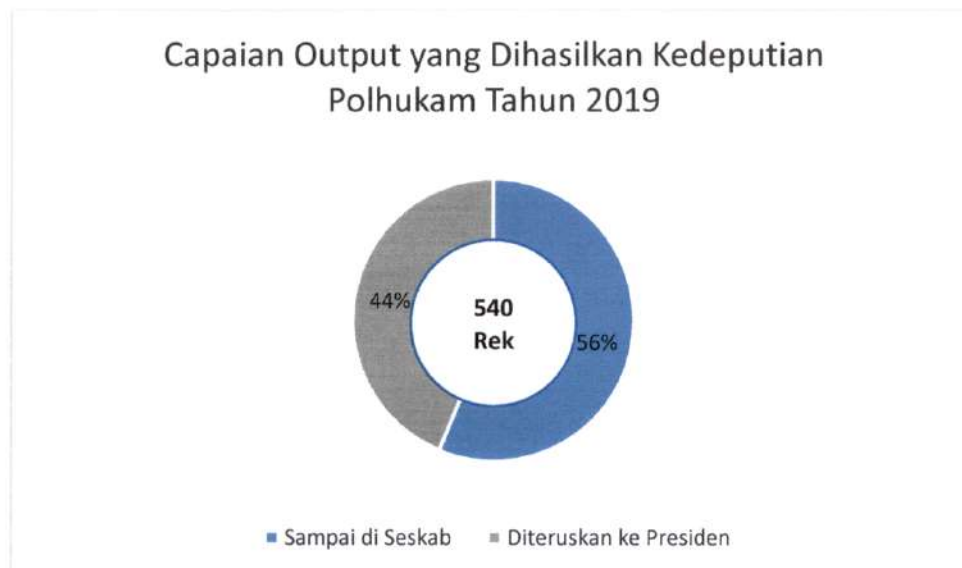


ditetapkan sebesar **100%** sehingga **capaian kinerja sama dengan realisasi persentase rekomendasi yang disetujui**, selain itu juga secara jumlah (kuantitas) output sangat tergantung dari Kementerian/Lembaga yang menyampaikan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet dimana setiap tahun terjadi *fluktuasi* (turun naik) dan tergantung dari Kebijakan Presiden di tahun tersebut berbeda-beda.

Dari 540 total output berupa rekomendasi yang dihasilkan Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan pada tahun 2019, sejumlah 304 rekomendasi atau sebesar 56,30% rekomendasi tersebut **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet **untuk disampaikan** kepada Presiden dan diteruskan kepada Pimpinan Kementrian/Lembaga untuk ditindaklanjuti, sedangkan 236 rekomendasi atau sebesar 43,70% **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet **untuk tidak disampaikan** kepada Presiden dan diteruskan kepada Pimpinan Kementrian/Lembaga, namun oleh Sekretaris Kabinet rekomendasi tersebut diberikan catatan/arahan/disposisi untuk ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Polhukam.

Gambar 3.4

Capaian Output Kedeputian Polhukam Tahun 2019



Indikator Kinerja 1

Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Kualitas rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet harus dilihat dari ketepatan substansi isi analisis. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada *stake*



holders untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, capaian indikator pertama mencapai **97% (Sangat Baik)** dari keseluruhan jumlah rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang kemudian disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Hal tersebut terlihat bahwa dari **368 (tiga ratus enam puluh delapan) rekomendasi** atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, sebanyak **355 (tiga ratus lima puluh lima) rekomendasi** disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk diteruskan/disampaikan kepada Presiden dan Menteri/Pimpinan Lembaga serta disetujui untuk tidak perlu diteruskan/disampaikan, namun memberikan arahan kepada Deputy Bidang Polhukam untuk menindaklanjutinya.

Rekomendasi yang disetujui disini telah memenuhi kriteria:

1. Rekomendasi yang disiapkan oleh Kedeputian Bidang Polhukam diteruskan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden sebagai bahan pengambilan kebijakan atau bahan alternatif yang dapat dipakai Presiden untuk memutuskan suatu kebijakan atau hanya untuk dibaca/diketahui Presiden sebagai referensi dan/atau *second opinion*.
2. Rekomendasi yang disiapkan oleh Kedeputian Bidang Polhukam diteruskan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Instansi terkait untuk diketahui sebagai referensi atau ditindaklanjuti sesuai kewenangannya (baik berupa surat maupun memorandum Sekretaris Kabinet).
3. Rekomendasi yang disiapkan oleh Kedeputian Bidang Polhukam digunakan oleh Sekretaris Kabinet dalam mengambil suatu kebijakan/keputusan atau dijadikan sebagai bahan referensi dalam pertemuan dengan Presiden atau instansi terkait atau audiensi dari utusan Negara sahabat, organisasi kemasyarakatan atau publik lainnya.
4. Rekomendasi yang disiapkan oleh Kedeputian Bidang Polhukam disetujui untuk tidak diteruskan kepada Presiden, Menteri atau Pimpinan Lembaga atau Kepala Daerah, terhadap rekomendasi tersebut Sekretaris Kabinet memberikan arahan/catatan/disposisi kepada Deputy Bidang Polhukam untuk menindaklanjutinya.

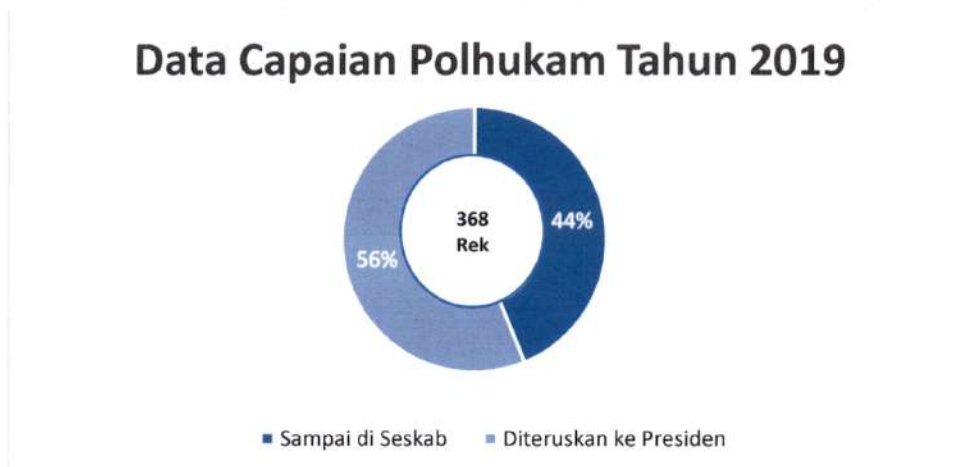
Di tahun 2019 ada sebanyak 13 rekomendasi bidang Polhukam yang tidak mendapat respon Sekretaris Kabinet, terhadap ke-tiga belas rekomendasi tersebut sudah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, namun turun tanpa ada catatan/disposisi Sekretaris Kabinet.

Dari 368 memo dengan sasaran indikator kinerja 1 yang dihasilkan pada tahun 2019 sebesar 207 memo atau sebesar 56,25% diteruskan ke Presiden sedangkan 161 memo atau 43,75% berhenti di Sekretaris Kabinet serta 13 rekomendasi atau 3,53% tidak mendapatkan catatan/arahan/disposisi dari Sekretaris Kabinet.



Gambar 3.5

Output Deputi IKK 1 yang naik ke Seskab



Tabel 3.5

Perbandingan Output dan Outcome IKK 1 Kedeputian Polhukam
Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Indikator	Output 2015	Out-come 2015	Output 2016	Out-come 2016	Output 2017	Out-come 2017	Output 2018	Out-come 2018	Output 2019	Out-come 2019
IKK 1	327	313	529	524	573	557	600	594	368	355
Total	327	313	529	524	573	557	600	594	368	355
Disetujui		95,72%		99,05%		97,21%		99,00%		96,47%
Tidak Disetujui		4,28%		0,95%		2,79%		1,00%		3,53%

Apabila melihat dari tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni 2015 s.d. 2019, capaian IKK 1 terbesar dan terkecil secara berturut-turut yakni: Tahun 2016 sebanyak 524 rekomendasi yang disetujui (99,05%) dari 529 rekomendasi yang diajukan, dan yang terkecil adalah di Tahun 2015 yakni sebanyak 313 rekomendasi yang disetujui (95,72%) dari 327 rekomendasi yang diajukan.
2. Jumlah rekomendasi yang diajukan mencapai jumlah terbanyak di tahun 2018 yakni 600 rekomendasi dan yang disetujui sebanyak 594 rekomendasi atau 99,00% dan yang terendah terjadi di tahun 2015 yakni sebanyak 327 rekomendasi yang diajukan dan sebanyak 313 rekomendasi disetujui Sekretaris Kabinet (95,72%).



3. Jumlah rekomendasi yang tidak mendapat respon (catatan/arahan/disposisi) terjadi di tahun 2015 yakni sebanyak 14 rekomendasi (4,28%) sedangkan terendah terjadi di tahun 2016 yakni sebanyak 5 rekomendasi (0,95%).
4. Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 dimana saat itu baru terbentuk struktur organisasi Sekretariat Kabinet yang baru sehingga tahun tersebut belum banyak rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (sebanyak 313 rekomendasi), hal tersebut juga terjadi di tahun 2019 dimana merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra sehingga rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet mengalami penurunan (sebanyak 355 rekomendasi).
5. Dalam kurun waktu 3 tahun yakni Tahun 2016, 2017, dan 2019, jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris kabinet mengalami kenaikan cukup signifikan yakni 529, 573, dan 600 rekomendasi. Trend kenaikan dan penurunan jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet tidak dapat diprediksi dengan tepat, mengingat setiap tahunnya usulan atau isu atau permasalahan yang disampaikan kepada Presiden atau Sekretaris Kabinet atau yang menjadi perhatian Presiden atau Sekretaris Kabinet sangat tergantung dari Kementerian/Lembaga atau masyarakat.
6. Secara umum jumlah *outcome* (rekomendasi yang disetujui) bidang Polhukam dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni Periode 2015 s.d. 2019 diatas 95% atau bila **dirata-ratakan sebesar 97,49%**.

Beberapa rekomendasi IKK 1 Bidang Polhukam yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dalam kurun waktu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

A. Isu-isu krusial bernilai strategis:

1. Perkembangan Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik (KTP-el).
2. Rapat Koordinasi Panitia Antar Kementerian Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat.
3. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan terkait Peran Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa guna Mengelola dan Memanfaatkan Dana Desa Secara Optimal.
4. Penyelesaian Permasalahan Tukar Menukar Aset Pemerintah Kota Surabaya Dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan TNI Angkatan Laut.
5. Penanggulangan dan Penegakan Hukum Pertambangan Emas Liar yang Menggunakan Merkuri.
6. Pembangunan Gedung Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.
7. Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau.



8. Pemberian Bantuan Pemerintah RI terkait Berbagai Kegiatan Kemanusiaan di Negara-Negara Sahabat.
 9. Keterlibatan Aktif dalam Kegiatan Kelompok Kerja Pengkaji Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah RI pada Organisasi Internasional (OI).
 10. Implementasi Kegiatan Kerja Sama yang Konkret berdasarkan Memorandum Saling Pengertian Sekretariat Kabinet dan Kementerian Legislasi Korea mengenai Pembentukan Badan Legislasi Tunggal Republik Indonesia.
 11. Usulan Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde, Kamerun.
 12. Integrasi antara Grand Design Sinkronisasi Penataan Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional dan Grand Design Organisasi TNI 2019-2024.
 13. Pengamanan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional.
 14. *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Pandangan Masyarakat dan pelaksanaan Nilai-nilai Pancasila di Kawasan Perbatasan Negara.
 15. Penyelenggaraan Kelompok Diskusi Terfokus Evaluasi Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.
- B. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan arahan Presiden untuk kemudian dijadikan kajian yang hasilnya disampaikan kepada Presiden, yaitu:
1. Pemantauan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.
 2. Konsep Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang Baik dalam Kerangka Kemitraan Bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 3. Kajian Penataan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian/Lembaga.
 4. Pemantauan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Kelurahan TA 2019.
- C. Mengikuti Anggota Delegasi RI pada Pertemuan Internasional di Luar Negeri
1. Sidang Ke-106 *International Maritime Organization Legal*, London, Inggris.
 2. *The 16th ASEAN Regional Forum Security Policy Conference*, di Bangkok, Thailand.
 3. Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Osaka, Jepang.
 4. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand.
 5. *The 15th Asia Legal Information Network (ALIN) General Meeting and International Conference*, di Bangkok, Thailand.
 6. *Asian-Pacific Postal Union (APPU) Executive Meeting*, di Tokyo, Jepang.
 7. Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat.
 8. *The 14th Joint Committee Meeting of General Review of Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* di Tokyo, Jepang.
 9. *The 8th UN Forum on Business and Human Rights* di Jenewa, Swiss.

Selain penyiapan rekomendasi terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Polhukam, Kedepuitan Polhukam juga melaksanakan kegiatan



SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

memonitoring tindak lanjut Arahan Presiden melalui aplikasi SITAP (Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden), dimana sampai dengan tahun 2019 status warna atas monitoring tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Status Warna Sitap Kedeputian Polhukam

NO	TAHUN	JUMLAH DISPOSISI	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH LAPORAN	INDIKATOR WARNA			
					H	K	M	A
1	2019	14	24	24	16	1	7	0
2	2018	18	27	27	20	7	0	0
3	2017	20	29	29	22	7	0	0
4	2016	20	30	30	24	6	0	0
5	2015	16	12	12	11	1	0	0
6	2014	7	3	3	3	0	0	0
JUMLAH		95	125	125	96	22	7	0

Ket:

- Warna Hijau : Selesai / Progress On Track
- Warna Kuning : Perlu Kerja Keras
- Warna Merah : Sulit Terwujud
- Warna Abu-Abu : Belum di Nilai

Dari Tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa setiap tahun Deputi Bidang Polhukam mendapatkan Arahan Presiden berdasarkan arahan Wakil Sekretaris Kabinet untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang disepakati bersama mitra kerja Deputi Bidang Polhukam (diinput di SITAP). Dari kegiatan yang sudah disepakati tersebut akan dimonitor sampai sejauh mana kemajuan pelaksanaannya melalui laporan yang diinput dalam SITAP dan diberikan tanda apakah sudah selesai sesuai target (warna hijau), perlu diselesaikan dengan kerja keras (warna kuning), sulit diwujudkan di tahun tersebut (warna merah), belum dinilai karena belum ada kegiatan yang tertuang dalam SITAP.



Indikator Kinerja 2

Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Dalam tahun 2019, Kedepatian Bidang Polhukam telah menghasilkan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi atas suatu rancangan PUU bidang Polhukam yang **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet sebanyak **38 (tiga puluh delapan) rekomendasi** atau **100% (sangat baik)** dari **38 (tiga puluh delapan) rekomendasi** yang diajukan. Rekomendasi persetujuan prakarsa/substansi ini dapat berupa surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Instansi yang berisi persetujuan kepada Menteri/Pimpinan untuk melanjutkan penyusunan suatu RPUU atau memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden atau Rancangan Keputusan Presiden atau Rancangan Instruksi Presiden untuk ditandatangani Presiden.

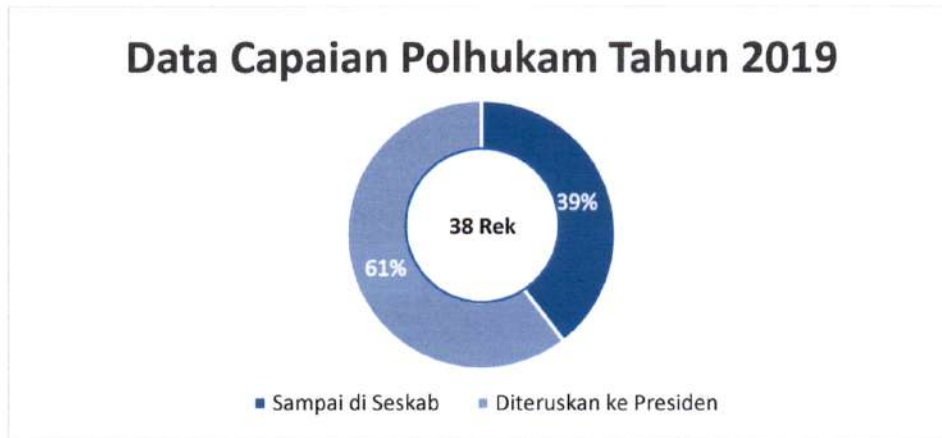
Terkait dengan substansi RPUU dapat berupa memorandum laporan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet berupa masukan yang diberikan dalam suatu rapat pembahasan RPUU yang diselenggarakan oleh Kementerian/Instansi terkait maupun yang diselenggarakan di Sekretariat Kabinet. Selain itu dapat juga berupa naskah surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang berisi catatan atas permohonan penyusunan suatu RPUU agar dikaji kembali atau dirumuskan ulang agar tidak terjadi tumpang tindih, multi tafsir atau bertentangan dengan PUU lainnya.

Dari 38 memo dengan sasaran indikator kinerja 2 yang dihasilkan pada tahun 2019 sebanyak 23 memo atau sebesar 60,52% diteruskan ke Presiden sedangkan 15 memo atau 39,40% hanya sampai ke Sekretaris Kabinet sebagai laporan dan ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.



Gambar 3.6

Output Deputi IKK 2 yang naik ke Seskab



Tabel 3.7

Perbandingan Output dan Outcome IKK 2 Kedeputian Polhukam
Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Indikator	Output 2015	Out-come 2015	Output 2016	Out-come 2016	Output 2017	Out-come 2017	Output 2018	Out-come 2018	Output 2019	Out-come 2019
IKK 2	13	13	65	65	67	65	42	42	38	38
Total	13	13	65	65	67	65	42	42	38	38
Disetujui		100%		100%		94,03%		100%		100%
Tidak Disetujui		0%		0%		5,97%		0%		0%

Dari tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni 2015 s.d. 2019, capaian IKK 2 terbesar dan terkecil secara berturut-turut yakni: Tahun 2016 sebanyak 65 rekomendasi yang disetujui (100%) dari 65 rekomendasi yang diajukan, dan yang terkecil adalah di Tahun 2017 yakni sebanyak 65 rekomendasi yang disetujui (94,03%) dari 67 rekomendasi yang diajukan.
2. Jumlah rekomendasi yang diajukan mencapai jumlah terbanyak di tahun 2017 yakni 67 rekomendasi dan yang disetujui sebanyak 65 rekomendasi atau 94,03% dan yang terendah terjadi di tahun 2015 yakni sebanyak 13 rekomendasi yang diajukan dan sebanyak 13 rekomendasi disetujui Sekretaris Kabinet (100%).



3. Jumlah rekomendasi yang tidak mendapat respon (catatan/arahan/disposisi) hanya terjadi di tahun 2017 yakni sebanyak 2 rekomendasi (5,97%).
4. Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 dimana saat itu baru terbentuk struktur organisasi Sekretariat Kabinet yang baru sehingga tahun tersebut belum banyak rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (sebanyak 13 rekomendasi), penurunan jumlah output/outcome juga terjadi di tahun 2019 dimana merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra sehingga rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet mengalami penurunan (sebanyak 38 rekomendasi).
5. Dalam kurun waktu 2 tahun yakni Tahun 2016 dan 2017 jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris kabinet mengalami kenaikan cukup signifikan yakni 65 dan 67 rekomendasi, sedangkan Tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 dan 2017 yakni sebesar 42 rekomendasi. Trend kenaikan dan penurunan jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet tidak dapat diprediksi dengan tepat, mengingat setiap tahunnya usulan RPUU yang disampaikan kepada Presiden sangat tergantung dari Kementerian/Lembaga.
6. Secara umum jumlah *outcome* (rekomendasi yang disetujui) bidang Polhukam dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni Periode 2015 s.d. 2019 diatas 95% atau bila **dirata-ratakan sebesar 98,81%**.

Beberapa rekomendasi IKK 2 Bidang Polhukam yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dalam kurun waktu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (RPP Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan).
3. Mekanisme Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional.
4. Pengesahan dan Sosialisasi Perpres Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional (KKOI).
5. Permohonan Pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Statute for the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (Statuta Institut Standar dan Metrologi untuk Negara-Negara Islam)/SMIIC.
6. Kelompok Kerja Penyusunan Rinpres tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020-2024.
7. Tim Kecil Harmonisasi RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi.



8. Penetapan Keppres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengalihan Penugasan Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan Menjadi Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah.
9. RKeppres tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 21 Komando Resor Militer.
10. Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI.
11. Perkembangan Penyusunan RPerpres tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2019 – 2024.
12. Sinkronisasi Penyusunan Masterplan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019.
13. Penajaman RInpres dan Rencana Aksi tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain, dan Skouw.
14. Rencana Perubahan atas Perpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
15. Pembahasan RPerpres tentang Program Pembangunan dan Pemeliharaan Kapal Selam.

Beberapa Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden Tahun 2019 yang disiapkan Kedeputian Bidang Polhukam guna penetapan Presiden adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Statute for The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (Statuta Institut Standard dan Metrologi untuk Negara Islam).
4. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
5. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kaimana dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat.



6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengalihan Penugasan Kontingan Garuda Bhayangkara Satuan Tugas *Formed Police Unit* Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa di Republik Sudan Selatan menjadi Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas *Formed Police Unit* Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa di Republik Afrika Tengah.
 7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Divisi Infanteri 3 Komando Cadangan Strategis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Komando Armada III, Komando Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara III, dan Pasukan Marinir 3
 8. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
 9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan

Indikator Kinerja 3

Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Polhukam dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tugas dan fungsi ini beririsan dengan tugas dan fungsi Deputy Dukungan Kerja Kabinet (sebelumnya Deputy Persidangan) yang tetap menyiapkan materi sidang yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga serta mengoordinasikan bahan yang diperoleh dari Deputy Substansi.



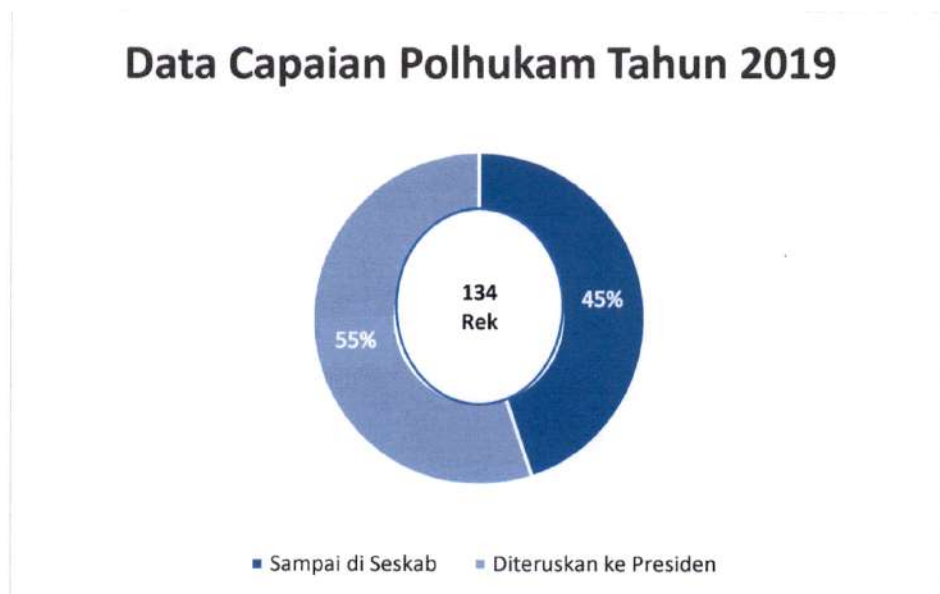
Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator kelima ini diantaranya berupa butir wicara atau *briefing sheets*, naskah pidato Presiden, bahan-bahan rapat baik rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam tahun 2019, Deputi Bidang Polhukam telah menyiapkan sebanyak **134 (seratus tiga puluh empat)** rekomendasi, dari **134 (seratus tiga puluh empat)** rekomendasi yang dinaikkan Deputi Polhukam, yang telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet sebanyak **133 (seratus tiga puluh tiga)** rekomendasi, dimana rekomendasi tersebut disampaikan sebagai materi/bahan atau referensi bagi Presiden atau Sekretaris Kabinet sendiri. Oleh karena itu capaian untuk indikator ini mencapai **99%** dengan kategori **sangat baik** atau dengan kata lain ada sekitar 1 (satu) rekomendasi yang diajukan tidak disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Dari 134 rekomendasi dengan sasaran indikator kinerja 3 yang dihasilkan pada tahun 2019 sebesar 74 rekomendasi atau sebesar 55,22% diteruskan ke Presiden sedangkan 60 rekomendasi atau 44,77% disampaikan hanya sampai Sekretaris Kabinet.

Gambar 3.7

Output Deputi IKK 3 yang naik ke Seskab





Tabel 3.8

Perbandingan Output dan Outcome IKK 3 Kedeputan Polhukam
Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Indikator	Output 2015	Out-come 2015	Output 2016	Out-come 2016	Output 2017	Out-come 2017	Output 2018	Out-come 2018	Output 2019	Out-come 2019
IKK 3	136	127	123	123	129	122	65	59	134	133
Total	136	127	123	123	129	122	65	59	134	133
Disetujui		93,38%		100%		94,57%		90,76%		99,25%
Tidak Disetujui		6,62%		0%		5,43%		9,24%		0,75%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni 2015 s.d. 2019, capaian IKK 3 terbesar dan terkecil yakni: Tahun 2016 sebanyak 123 rekomendasi yang disetujui (100%) dari 123 rekomendasi yang diajukan, dan yang terkecil adalah di Tahun 2018 yakni sebanyak 59 rekomendasi yang disetujui (90,76%) dari 65 rekomendasi yang diajukan.
2. Jumlah rekomendasi yang diajukan mencapai jumlah terbanyak di tahun 2019 yakni 134 rekomendasi yang diajukan dan sebanyak 133 rekomendasi disetujui atau 99,25% dan yang terendah terjadi di tahun 2018 yakni sebanyak 65 rekomendasi yang diajukan dan sebanyak 59 rekomendasi disetujui Sekretaris Kabinet (90,76%).
3. Jumlah rekomendasi yang tidak mendapat respon (catatan/arahan/disposisi) terjadi di tahun 2018 yakni sebanyak 6 rekomendasi (9,24%) sedangkan terendah terjadi di tahun 2019 yakni sebanyak 1 rekomendasi (0,75%).
4. Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 dimana saat itu baru terbentuk struktur organisasi Sekretariat Kabinet yang baru, namun di tahun tersebut terdapat banyak rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (136 rekomendasi), hal tersebut juga terjadi di tahun 2019 dimana merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet mengalami kenaikan (sebanyak 134 rekomendasi).
5. Khusus untuk IKK 3 ini jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet mengalami fluktuasi. Trend kenaikan dan penurunan jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet tidak dapat diprediksi dengan tepat, mengingat setiap tahunnya rekomendasi terkait materi sidang/rapat terbatas Bidang



Polhukam sangat tergantung dari Kementerian/Lembaga yang mengajukan atau jadwal sidang kabinet/rapat terbatas/pertemuan yang dihadiri oleh Presiden.

6. Secara umum jumlah *outcome* (rekomendasi yang disetujui) bidang Polhukam dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni Periode 2015 s.d. 2019 diatas 95% atau bila **dirata-ratakan sebesar 95,59%**.

Beberapa rekomendasi IKK 3 Bidang Polhukam yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dalam kurun waktu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan Bahan Presiden dalam Acara Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Seluruh Indonesia.
2. Penyiapan Bahan Sekretaris Kabinet pada Rapat Konsultasi Antara Presiden dan Pimpinan DPR RI periode 2019-2024.
3. Penyiapan Bahan Sekretaris Kabinet dalam Mendampingi Presiden Menerima Anggota Bawaslu RI.
4. Penyiapan Bahan Pertemuan Presiden dengan Para Ketua Paguyuban Provinsi Papua.
5. Penyiapan Bahan Rapat Terbatas tentang Strategi Pengembangan Riset dan Inovasi serta Penataan Badan Riset dan Inovasi.
6. Penyiapan Butir Wicara Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Tahun 2019.
7. Penyiapan Bahan Sekretaris Kabinet dalam Menghadiri Pembukaan Kongres Ikatan Notaris Internasional (*The International Union of Notaries/UINL*) Ke-29.
8. Hasil-hasil Kunjungan Presiden RI ke Arab Saudi, pada tanggal 14-15 April 2019.
9. Penyiapan Matriks Butir Wicara Presiden RI dalam rangka Menghadiri Forum Internasional dan dalam rangka menerima Tamu Negara: Penyampaian Matriks Butir Wicara dan Bahan Substansi Kunjungan Kerja Presiden RI dalam rangka Menghadiri Pertemuan KTT ASEAN ke-35 dan PertemuaTerkait Lainnya di Bangkok, Thailand, tanggal 2 s.d. 4 November 2019.
10. Penyiapan Bahan Substansi Pertemuan yang Dihadiri oleh Presiden RI: Penyampaian Bahan Substansi Rapat Internal mengenai Persiapan Kunjungan Putra Mahkota Abu Dhabi/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab (PEA), Y.M. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ke Indonesia pada tanggal 24 Juli 2019, di Istana Merdeka, tanggal 19 Juli 2019.
11. Butir Wicara Presiden pada Rapat Pimpinan TNI Tanggal 29 Januari 2019.
12. Permohonan Kehadiran Presiden dalam Puncak Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2019.
13. Usulan Rapat terbatas tentang Pembahasan Masterplan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara.



14. Permohonan Presiden Memberi Ceramah Pembekalan TNI.
15. Usulan Topik Rapat Terbatas "Percepatan Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana".

Dari penjelasan di atas, maka realisasi kinerja Deputy Bidang Polhukam selama tahun 2019 adalah perbandingan keseluruhan rekomendasi yang disampaikan (*output*) sebanyak 540 dengan capaian rekomendasi yang disetujui (*outcome*) sebanyak 526 sehingga persentase capaian sebesar **97,40%**. Untuk lebih jelasnya berikut ikhtisar capaian kinerja Deputy Bidang Polhukam selama tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 3.9
Ikhtisar Capaian Sasaran Deputy Bidang Polhukam Tahun 2019

SASARAN	TARGET		REALISASI KINERJA			% CAPAIAN	
	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	%CAPAIAN	OUTPUT	OUTCOME
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	540 Rek	540 Rek	540 Rek	526 Rek	97,40%	100% (540 Rek)	97,40% (526 Rek)

*Rek : Rekomendasi

Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan kontribusi Deputy Bidang Polhukam memberikan manfaat kinerja cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan meskipun masih ada 14 rekomendasi tersebut (13 rekomendasi IKK 1 dan 1 rekomendasi IKK 3) tidak mendapat catatan/arahan dari Sekretaris Kabinet sehingga dikategorikan **tidak disetujui**. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait terkait suatu kebijakan dan program pemerintah;



- b. Munculnya isu-isu penting bidang politik, hukum, dan keamanan yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi; dan
- c. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, Dewan, Badan atau Kelompok Kerja tingkat nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah baik di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Walaupun pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Polhukam pada Tahun 2019 dapat dikategorikan sangat baik, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya:

- a. Koordinasi dengan instansi terkait, mengenai penyiapan bahan sidang kabinet atau rapat terbatas, sehingga memerlukan inovasi tersendiri bagi pegawai di lingkungan Kedeputusan Bidang Polhukam untuk mendapatkan bahan tersebut, sehingga cenderung bahan yang disampaikan dapat dijadikan sebagai *second opinion* bagi Presiden dalam memberikan arahan dalam sidang atau rapat tersebut.
- b. Sistem aplikasi berbasis IT yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menyusun rekomendasi perlu dibangun dan terintegrasi sehingga lebih memudahkan dan mempercepat penyelesaian tugas, mengingat waktu penyelesaian sangat menjadi prioritas Presiden.
- c. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas; dan
- d. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif juga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
- b. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.



- c. Peningkatan kualitas tata laksana, dan sumber daya manusia dalam pengkajian, penyusunan rekomendasi dan analisis, serta evaluasi kebijakan dan program pemerintah melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di bidang yang diperlukan oleh Deputi Bidang Polhukam, pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja.
- d. Perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait menjalin *networking* seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan perundangan lainnya, Deputi Bidang Polhukam menyarankan perlunya dilakukan *review* atas perencanaan kinerja dan capaian kinerja dilakukan untuk menganalisis celah kinerja (*performance gap*) sasaran strategis yang ditargetkan dengan capaiannya guna perbaikan.

B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Deputi Bidang Polhukam menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet, merupakan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*.



Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut diatas pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi muara semua kegiatan itu pada intinya adalah satu, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* dikandung maksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang politik, hukum, dan keamanan tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Secara umum seluruh Rekomendasi (IKK 1, IKK 2, dan IKK 3) yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet di Tahun 2019 sebanyak 540 Rekomendasi, jumlah tersebut berasal dari surat/berkas bidang Polhukam usulan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga kepada Presiden dan/ayas Sekretaris Kabinet yang dikemudian ditelaah/



dipelajari/dianalisis sehingga menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan Presiden sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan. Selain dari surat/berkas masuk, penyusunan rekomendasi juga didasarkan pada penugasan dari Sekretaris Kabinet atau inisiatif yang diambil dari hasil rapat terbatas, sidang kabinet, maupun dari media elektronik terkait isu strategis bidang Polhukam yang perlu dikaji melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan guna menghasilkan suatu rekomendasi.

Setiap tahunnya jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet mengalami *fluktuasi (pasang surut)* mengikuti trend kebijakan program prioritas atau program strategis Presiden di tahun tersebut (RPJMN dan RKP Tahunan) dan jumlah rekomendasi yang disampaikan sangat bergantung pada *trend* kebijakan tersebut sehingga untuk output rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet tidak bisa tetap dan tidak bisa naik setiap tahunnya. Dari rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, tentunya akan melihat apa rekomedasi yang diberikan, rekomendasi yang bersifat strategis tentunya akan diteruskan kepada Presiden sebagai bahan pengambilan kebijakan/keputusan Presiden dalam bentuk memo beserta pointers, pidato, bahan rapat, bahkan rancangan peraturan yang perlu ditetapkan Presiden, ada juga rekomendasi yang perlu diteruskan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga akan disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga melalui surat Sekretaris Kabinet guna ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sesuai Arahan Presiden.

Selain itu usulan rekomendasi bidang Polhukam yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dapat berisi laporan hasil rapat atau hasil kajian atas suatu usulan yang tidak perlu diteruskan kepada Presiden, tetapi cukup diselesaikan oleh Deputi atas arahan/petunjuk/disposisi Sekretaris Kabinet kepada Deputi Bidang Polhukam untuk selanjutnya ditindaklanjuti Deputi oleh para Asdep beserta Jajarannya. Dua kriteria rekomendasi yang **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet tersebut di atas dihitung sebagai outcome Deputi dimana di tahun 2019 ini dari 504 rekomendasi yang disampaikan (output) yang disetujui (outcome) sebanyak 526 disetujui atau 97,40%, sedangkan 14 rekomendasi lainnya dimasukkan dalam kategori **tidak disetujui**, adapaun ke-14 rekomendasi tersebut masuk dalam kategori tidak disetujui bukan berarti rekomendasi yang disampaikan benar-benar tidak disetujui, tetapi lebih pada atas berkas rekomendasi tersebut Sekretaris Kabinet tidak memberikan catatan/arahan/disposisi atau berkas turun dari TU Sekretaris Kabinet tanpa ada tulisan/coretan Sekretaris Kabinet.



C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan sebesar **Rp.6.525.218.000,- (enam milyar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)** yang terbagi kedalam 4 (empat) kegiatan besar yang dilakukan oleh keempat unit eselon II di bawahnya.

Realisasi anggaran sampai akhir tahun 2019 untuk pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam adalah sebesar **Rp.6.512.959.384,- (enam milyar lima ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah)** atau sebesar **99,81%** dan merupakan penyerapan terbesar selama kurun waktu 2015 s.d. 2019. Angka ini sangat baik penyerapannya, mengingat penyerapan minimal yang dapat dicapai oleh setiap Kementerian/Lembaga adalah sebesar **90,00%**.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan antara anggaran yang diberikan dan realisasinya sejak Tahun 2016 s.d. Tahun 2019 dimana untuk Tahun 2015 tidak dapat dijadikan sebagai pembanding karena masih menggunakan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang lama yang sangat berbeda dengan tugas dan fungsi sebagaimana Perpres Nomor 15 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, dimana penganggarannya mulai disusun untuk pagu Tahun 2016.

Tabel 3.10
Perbandingan Pagu & Realisasi Anggaran Deputi Bidang Polhukam
Tahun 2016 s.d. Tahun 2019

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian%
2016	3.500.000.000	2.669.772.112	76,28%
2017	3.822.328.000	3.667.024.174	95,94%
2018	2.778.592.000	2.729.984.172	98,25%
2019	6.525.218.000	6.512.959.384	99,81%



Gambar 3.8

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran



Tabel berikut akan menggambarkan pencapaian kinerja dan anggaran Deputy Bidang Polhukam Tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 3.11
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Deputy Bidang Polhukam
Tahun 2019

Sasaran	Pagu Tahun 2019	Realisasi	% Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp. 6.525.218.000,-	Rp. 6.512.959.384,-	99,81	97.04

Dalam kurun satu tahun (2019) Deputy Bidang Polhukam telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sangat baik, hal tersebut terlihat dari sisi realisasi anggaran Tahun 2019 yang terserap sebesar **99,81%** dan capaian kinerjanya sebesar **94,07%**, hal tersebut memperlihatkan bahwa secara umum realiasi anggaran dan kinerja Deputy Bidang Polhukam sudah di atas 95%, meskipun dari sisi capaian kinerja masih di bawah target yang ditetapkan yakni 100%, belum tercapainya target tahun 2019 tersebut karena ada 14 rekomendasi bidang Polhukam yang turun dari Sekretaris Kabinet tanpa ada catatan/arahan/disposisi sehingga tidak diketahui atas berkas tersebut apakah disetujui atau tidak disetujui, sehingga disimpulkan bahwa rekomendasi tersebut tidak disetujui Sekretaris Kabinet.



Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pasca restrukturisasi dengan sasaran strategis yang baru adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12

Gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Strategis Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019

SASARAN STRATEGIS					
% CAPAIAN OUTCOME	OUTPUT	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
97,40	Rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Output	Rekomendasi	540	526
		Input	Rupiah	6.525.218.000,-	6.512.959.384,-
		Input rata-rata per output	Rupiah	12.083.737,-	12.382.071,-
1. Penghematan dana	=	Rp.12.258.616,- (0,19%)			
2. Efisiensi	=	-			
3. Efektifitas	=	% capaian sasaran < % target			

Bila melihat tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Deputi Bidang Polhukam masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp 12.258.616,- atau (0,19%) dari pagu anggaran yang diberikan di tahun 2019, hal ini berarti sisa anggaran yang tidak digunakan sangat kecil masih di bawah 1%.

Apabila diperbandingkan dengan rata-rata anggaran yang digunakan untuk menghasilkan target output sebanyak 540 rekomendasi maka anggaran rata-rata yang diperlukan untuk menghasilkan 1 (satu) rekomendasi sebesar Rp 12.083.737,-, namun dalam realisasinya ternyata dengan anggaran yang ada jumlah capaian outcome sebanyak 526 rekomendasi sehingga anggaran untuk menghasilkan 1 (satu) rekomendasi rata-rata sebesar Rp 12.382.071,- (ada kelebihan sebesar Rp 298.334,- atau 2% lebih besar dari target).